

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

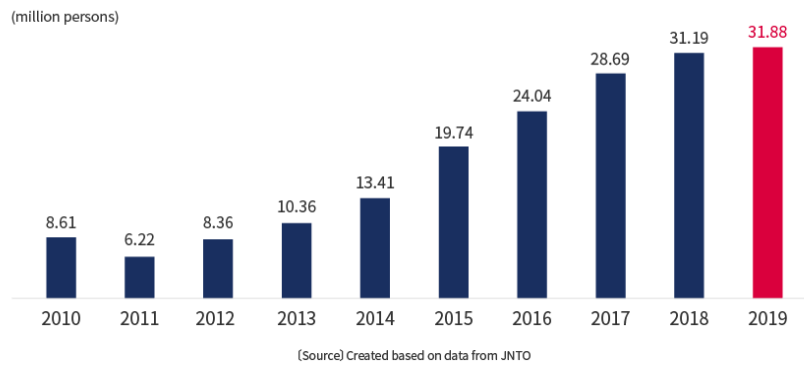
Pariwisata adalah salah satu sektor industri yang sedang populer di beberapa negara saat ini. Menurut studi yang dilakukan Harun Rasool melalui data panel dari tahun 1995 hingga 2015 mengenai *inbound tourism* atau pariwisata masuk, pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan bahwa pariwisata telah tumbuh secara eksponensial. Pertumbuhan ini dikarenakan kontribusi pariwisata semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan menambah cadangan devisa, merangsang investasi dalam infrasktruktur baru, modal manusia dan meningkatkan persaingan, mempromosikan pengembangan industri, dan menciptakan lapangan kerja.¹ Oleh karena itu, sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan nasional secara langsung dan juga berpengaruh untuk mengembangkan sektor lain seperti bisnis dan ketenagakerjaan.

Jepang adalah salah satu negara dengan kunjungan wisata terbesar di dunia dengan jumlah kunjungan pada tahun 2019 adalah 31,88 juta orang, hal ini menunjukkan pariwisata merupakan salah satu sektor industri terbesar di Jepang. Selain itu, beberapa tahun terakhir Jepang mengalami peningkatan kunjungan wisatawan asing secara signifikan. Japan National Tourism Organization melaporkan jumlah pengunjung asing yang masuk ke Jepang setiap tahunnya, disajikan dalam bentuk grafik dibawah ini:

¹ Harun Rasool dkk, "The Relationship Between Tourism and Economic Growth among BRICS Countries : A Panel Cointegrations Analysis", di publikasikan pada 5 Januari 2021, diakses pada 13 Maret 2023, <https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/s43093-020-00048-3.pdf>

Gambar 1.1 Jumlah Pengunjung ke Jepang (2010-2019)²

Figure 1 Number of foreign visitors to Japan (2010 to 2019)



Gambar 1.1 Jumlah Pengunjung ke Jepang (1

Sumber: JETRO

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengunjung yang datang ke Jepang terus bertambah setiap tahunnya. Para wisatawan yang berkunjung ke Jepang ini jika diurutkan menurut negara asalnya menghasilkan 25,3% adalah wisatawan dari Tiongkok, sebanyak 20,3% dari Korea Selatan, 18,6% dari Taiwan, 7,7% dari Hongkong sisanya berasal dari Asia Tenggara, Amerika, Eropa dan lain-lain. Banyaknya wisatawan dari Tiongkok disebabkan oleh mulai membaiknya hubungan bilateral antara Tiongkok dan Jepang, sehingga prosedur masuk ke Jepang juga dipermudah oleh Pemerintah Tiongkok.³ Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa wisatawan dari Tiongkok memiliki persentase lebih besar dibandingkan wisatawan dari negara lainnya.

²JETRO, "Tourism Overview", https://www.jetro.go.jp/en/invest/attractive_sectors/tourism/overview.html, diakses pada 23 Februari 2023.

³ Ministry of Land Infrastructure, Transport and Tourism "White Paper on Tourism" 2017.

Banyaknya wisatawan dari Tiongkok juga didukung dengan prosedur masuk warga negara Tiongkok dan beberapa negara lain di Asia yang telah dipermudah oleh Pemerintah Jepang sehingga hal ini dimanfaatkan oleh Jepang untuk menarik turis dari Tiongkok untuk berlibur ke negara mereka, sehingga hasilnya turis dari Tiongkok hampir selalu mendominasi jumlah kedatangan terbanyak ke Jepang setiap tahun.⁴ Jepang telah menerapkan beberapa perubahan signifikan untuk mengubah hubungan dengan negara-negara kawasan Asia Timur melalui diplomasi dan negosiasi.

Kehadiran wisatawan Tiongkok memberikan keuntungan bagi pendapatan nasional Jepang di sektor pariwisata jumlah total uang yang dihabiskan oleh wisatawan Tiongkok untuk berwisata ke Jepang pada tahun 2019 mencapai JPY1,8 triliun.⁵ Keuntungan tersebut mendorong Jepang akan terus melanjutkan kerjasama dengan Tiongkok, melalui kerjasama bilateral di bidang ekonomi. Sesuai dengan konsep politik luar negeri yang mana Jepang membuat kebijakan untuk bekerjasama dengan Tiongkok demi mencapai kepentingan nasional mereka.⁶

Virus *Corona* yang muncul pertama kali di Tiongkok pada akhir tahun 2019 yang akhirnya berubah menjadi pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 membuat hampir seluruh dunia menghentikan pergerakan manusia dengan memberlakukan *lock down* atau kebijakan-kebijakan yang hampir serupa, sehingga, berimbas ke berbagai sektor industri termasuk pariwisata. Menurut

⁴ Ministry Of Land, Infrastructure, Transport and Tourism “White Paper on Tourism” 2016.

⁵ Nippon.com, “Chinese Visitors Spend 1.8 Trillion Yen in Japan in 2019”, di publikasikan pada 12 Februari 2020, diakses pada 8 Maret 2023, <https://www.nippon.com/en/japan-data/h00646/chinese-visitors-spend-%C2%A51-8-trillion-in-japan-in-2019.html>

⁶ Stephen J. Andriole, “Decision Process Models and the Needs of Policy-Makers: Thoughts on the Foreign Policy Interface”, *Policy Sci* 11, 19-37(1979).

laporan International Monetary Fund (IMF) jumlah kedatangan pariwisata menurun hingga 65% pada paruh pertama 2020.⁷ UNWTO (United Nations World Tourism Organization) memprediksi dampak buruk dari pandemi Covid-19 terhadap industri pariwisata dunia adalah dapat menurunkan pendapatan ekspor dari \$910 miliar hingga \$1,2 triliun pada tahun 2020.⁸

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang paling besar pada kehidupan pariwisata masyarakat Tiongkok, yaitu termasuk pada preferensi wisata. Sebelum terjadinya pandemi Covid-19 destinasi populer seperti Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Thailand telah banyak terdampak pandemi, sehingga itu juga menyulitkan wisatawan Tiongkok untuk berkunjung ke negara-negara tersebut. Namun, di sisi lain pandemi ini merusak hubungan luar negeri Tiongkok dengan negara lain sehingga hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap datangnya wisatawan dari Tiongkok. Pada akhirnya warga Tiongkok akan merasa cemas untuk melakukan kunjungan ke negara lain, namun untuk negara yang mengandalkan Tiongkok sebagai penyumbang pendapatan sektor pariwisata terbesar hal ini bisa menjadi dilema antara kondisi nasional dan luar negeri.⁹

Jumlah kasus yang terkonfirmasi Covid-19 di Jepang pada tahun 2020 hingga bulan Maret tahun 2022 adalah 21.150.371 kasus dan 44.576 orang

⁷ International Monetary Fund, "Tourism-Dependent Economies are Among Those Harmed the Most by the Pandemic", diakses pada 2 Maret 2023 <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2020/12/impact-of-the-pandemic-on-tourism-behsudi>

⁸ Secretary-General's Policy Brief on Tourism and COVID-19, "Tourism and COVID-19 Unprecedented economic Impacts", diakses pada 2 Maret 2023 <https://www.unwto.org/tourism-and-covid-19-unprecedented-economic-impacts>

⁹ Gian Maria Milesi-Ferreti, "The COVID-19 Travel Shock Hit Tourism-Dependent Economies Hard", Brookings, dipublikasikan pada 12 Agustus 2021, diakses pada 10 Maret 2023, <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/08/WP74-Milesi-Ferretti.pdf>

dinyatakan meninggal.¹⁰ Pemerintah Jepang melakukan kontrol perbatasan dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan visa bagi pengunjung yang datang dari 111 negara dan pada tanggal 4 Mei 2020 PM Shinzo Abe memperluas keadaan darurat nasional di seluruh prefektur di Jepang.¹¹ Situasi ini dapat dipahami sebagai pencegahan bertambahnya korban yang terjangkit virus Corona.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap industri pariwisata Jepang terlihat pada jumlah kedatangan turis pada tahun 2020, dimana semula jumlah pengunjung yang datang ke Jepang adalah 2,66 juta pada Januari, turun 1,1% dari bulan yang sama. Sejak saat itu, jumlahnya menurun tajam, dengan rekor terendah 2.917 pada bulan April. Kemudian jumlah ini terus menurun pada bulan Mei yaitu 1.663 orang, jumlah ini terus menurun tajam hingga 99,9% pada bulan yang sama. Dalam perjalanan domestik, jumlah wisatawan domestik menurun sebesar 47,1% pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya menjadi 26,74 juta pada bulan Maret.

Situasi ini berdampak besar pada industri pariwisata, menurut survei Kementerian Pertanian, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, persentase jumlah reservasi pada tempat penginapan menurun 50% pada bulan Maret dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, penurunan ini terus berlangsung sampai bulan berikutnya hingga mencapai 90%.¹² Jepang berada pada situasi sulit mengenai industri perjalanan dengan jumlah ini yang

¹⁰ COVID-19 Japan, “Japan Coronavirus Tracker”, diakses pada 27 September 2022, <https://covid19japan.com/>

¹¹ Secretary-General’s Policy Brief, “[COVID-19] Government Responses on the Coronavirus Disease 2019” Dipublikasikan Juli 2020, https://japan.kantei.go.jp/ongoingtopics/_00013.html

¹² Invest Japan, “Attractive Sectors: Tourism” Maret 2021, diakses pada 4 April 2023, https://www.jetro.go.jp/en/invest/attractive_sectors/tourism/overview.html

mana penurunan drastis yang akan terus berdampak di masa depan perekonomian Jepang.

Jepang masih bertekad untuk memperbaiki sektor pariwisatanya dengan melonggarkan sejumlah aturan tentang perbatasan. Perdana Menteri Fumio Kishida mengumumkan menerima pelancong individu untuk masuk ke Jepang mulai bulan September 2022 dengan syarat yaitu harus memberikan sertifikat vaksin yang valid dan telah menerima tiga dosis atau memberikan bukti hasil negatif terhadap Covid-19. Pembukaan perbatasan ini diharapkan para penggiat sektor wisata akan siap dengan ledakan pengunjung yang diprediksi akan membludak setelah kebijakan ini diluncurkan.¹³ Kishida juga mengungkapkan kepada publik bahwa Pemerintah Jepang tidak akan ragu dan takut dalam membuat kebijakan guna menghidupkan kembali sektor pariwisata, dan berjanji akan mempercepat respon terkait penanggulangan infeksi.¹⁴

Setelah membuka pintu bagi wisatawan internasional, Jepang menghadapi masalah lain yaitu Tiongkok menghimbau warganya untuk tidak berwisata ke luar negeri. Hal ini disebabkan oleh Covid-19 di negara tersebut masih belum hilang sepenuhnya, sehingga Pemerintah Tiongkok menyarankan kepada rakyatnya untuk tetap berada di Tiongkok. Hal ini menjadi halangan bagi Jepang, karena Tiongkok adalah penyumbang wisatawan terbesar. Puncaknya pada tahun 2019 sebanyak 9,6 juta turis dari Tiongkok mengunjungi Jepang dari total kunjungan

¹³ Siripala Thisanka, "Japan Set to Welcome Unrestricted Tourism by October". 14 September 2022, diakses 23 Oktober 2022, <https://thediplomat.com/2022/09/japan-set-to-welcome-unrestricted-tourism-by-october/>

¹⁴ VOA Indonesia "Jepang Longgarkan Kontrol Perbatasan Terkait COVID-19 Mulai 7 September"

31,88 juta pada tahun yang sama.¹⁵ Jepang harus mencari alternatif lain untuk mencari turis dari negara lain selain Tiongkok.¹⁶

Tiongkok mengalami kenaikan kasus Covid pada akhir tahun 2022 yang menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Menindaklanjuti situasi tersebut, Jepang mengeluarkan kebijakan kontrol perbatasan (*Border Measure Controls*) yang diatur dalam kebijakan imigrasi dengan mengetatkan kembali perbatasan mereka untuk membatasi kedatangan warga Tiongkok (tidak termasuk Hongkong dan Macau) untuk mencegah penyebaran Covid yang dibawa oleh warga Tiongkok ke Jepang. Aturan ini dikeluarkan melalui situs Kementerian Luar Negeri Jepang, hal ini mewajibkan tes Covid langsung setelah sampai di Jepang, apabila hasilnya positif maka harus dilakukan karantina selama seminggu. Sementara itu wisatawan yang datang dari negara selain Tiongkok daratan hanya perlu menyerahkan sertifikat vaksin dan hasil negatif Covid yang diperoleh dari negara asal.¹⁷ Kebijakan serupa juga diterapkan oleh beberapa negara lain seperti Korea Selatan, Inggris, India, Amerika Serikat dan seterusnya.¹⁸

¹⁵ Takemi Nakagawa & Tasuku Ikeda, "Japan Opens up to Chinese Tourists, But Can it Handle the Rush?", *Nikkei Asia*, dipublikasikan pada 1 Maret 2023, diakses pada 5 Mei 2023, <https://asia.nikkei.com/Business/Travel-Leisure/Japan-opens-up-to-Chinese-tourists-but-can-it-handle-the-rush>

¹⁶ Japan Times "Recovery of Japan's Inbound tourism likely muted without Chinese visitors", Kazuaki Nagata, diakses pada 5 Oktober 2022, <https://www.japantimes.co.jp/news/2022/10/05/business/japan-inbound-tourism-chinese-visitors/>

¹⁷ Ministry of Foreign Affairs, "Border Enforcement Measures to Prevent the Spread of Novel Coronavirus (COVID-19)," *Ministry of Foreign Affairs of Japan*, https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html.

¹⁸ Evelyn cheng, "Here's Where Covid Rules for Visitors from China Are Changing," *CNBC*, last modified December 29, 2022, accessed October 2, 2023, https://www-cnbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.cnbc.com/amp/2022/12/29/heres-where-covid-rules-for-visitors-from-china-are-changing.html?amp_gsa=1&js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_ct=1702943138168&_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17029431173225&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.cnbc.com%2F2022%2F12%2F29%2Fheres-where-covid-rules-for-visitors-from-china-are-changing.html.

Tiongkok menanggapi kebijakan ini dengan reaksi keras dari Tiongkok yaitu pembekuan penerbitan visa warga negara Jepang dan Korea Selatan yang masuk ke Tiongkok karena hal ini dianggap sebagai tindakan diskriminatif. Namun, negara lain tidak mendapatkan sanksi serupa yang didapatkan oleh Jepang dan Korea Selatan, sehingga hal ini memicu polemik diantara negara-negara ini. Jepang kemudian mengancam kebijakan Tiongkok dengan mengancam akan terus menegatkan kontrol perbatasan.¹⁹

1.2 Rumusan Masalah

Pariwisata sebagai sektor yang diharapkan dapat pulih setelah pandemi Covid-19 di Jepang mengalami hambatan dikarenakan penyumbang pendapatan pariwisata terbesar datang dari Tiongkok. Namun, jumlah kasus Covid-19 yang masih tetap tinggi di negara tersebut menyebabkan Jepang tidak ingin membuka perbatasan sepenuhnya bagi warga negara Tiongkok untuk masuk. Kemudian reaksi pembalasan yang dilayangkan oleh Tiongkok seperti melarang penerbitan visa bagi pengunjung dari Jepang. Tiongkok menganggap bahwa kebijakan kontrol perbatasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Covid. Untuk itu, penulis akan meneliti apa faktor yang mempengaruhi kebijakan kontrol perbatasan Jepang sehingga Jepang memberlakukan kebijakan tersebut terhadap Tiongkok, padahal ketika itu mereka sangat membutuhkan Tiongkok untuk memulihkan pariwisata mereka.

¹⁹ Frederic Lemaltre & Philippe Mesmer “China Sanction South Korea and Japan for Imposing Covid-19 Related Travel Restriction”, dipublikasikan pada 12 Januari 2023, diakses pada 23 Maret 2023, https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/01/12/china-sanctions-south-korea-and-japan-for-imposing-covid-19-related-travel-restrictions_6011279_4.html

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, pertanyaan penelitian yang dijawab, yaitu “Apa saja faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan kontrol perbatasan Jepang terhadap Tiongkok dalam pemulihan sektor pariwisata?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Tiongkok dalam pemulihan sektor pariwisata

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian bermanfaat untuk membahas tentang kajian kebijakan luar negeri khususnya pembuatan kebijakan kontrol perbatasan Jepang terhadap pengunjung Tiongkok terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi lebih luas dari konseptualisasi sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pemikiran Ahmed Aref Al Kafarneh (2013) untuk menjelaskan perilaku Jepang.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca khususnya mahasiswa jurusan Hubungan Internasional dalam memahami kebijakan kontrol perbatasan Jepang terhadap Tiongkok pasca Covid-19 dalam konteks pariwisata dan para pembuat keputusan luar negeri untuk merumuskan kebijakan untuk pemulihan sektor pariwisata.

1.6 Tinjauan Pustaka

Ada beberapa referensi yang terkait yang digunakan sebagai tinjauan dalam meneliti masalah dan judul yang dituju. Referensi ini termasuk referensi pertama karya Saburo Takizawa yang berjudul *“Japan’s Immigration Policy 2015-2020: Implications for Human Security of Immigrant Worker and Refugees”*. Tulisan ini menjelaskan tentang perkembangan kebijakan imigrasi yang di dalamnya juga mengatur tentang izin masuk turis asing. Jepang memiliki lembaga imigrasi bertugas untuk mengurus kedatangan dan kepergian orang asing di Jepang. Penulis ini juga menjelaskan aspek-aspek apa saja yang menjadi prinsip kerja lembaga pelayanan imigrasi Jepang serta menjelaskan bagaimana lembaga ini juga mempromosikan pariwisata Jepang²⁰

Perbedaan tulisan di atas dengan penelitian ini adalah tentang spesifikasi objek yang diteliti. Pada tulisan di atas membahas secara luas tentang kebijakan imigrasi yang dikeluarkan oleh Jepang yang di dalamnya terdapat informasi terkait penerimaan tenaga kerja, mahasiswa asing, turis dari luar negeri dan pencari suaka. Sementara itu, penelitian ini akan melihat apa saja faktor yang menjadi pertimbangan Pemerintah Jepang dalam mengeluarkan kebijakan imigrasi dalam mengontrol perbatasan ketika dihadapkan dengan masalah Pandemi Covid-19.

Referensi kedua karya Xiaozheng Liu yang berjudul *“Cause Analysis of the Development of Japan’s Tourism Industry Based on the Push-Pull Theory”*. Tulisan ini menjelaskan tentang perkembangan industri pariwisata di Jepang

²⁰ Saburo Takizawa, “Japan’s Immigration Policy 2015-2020: Implications for Human Security of Immigrant Workers and Refugees”, *Journal of Human Security Studies*, Vol. 10, No.2 (Special Issue 2021). pp.51-78.

sejak Jepang menerapkan kebijakan mendirikan negara berbasis pariwisata pada tahun 2003. Di dalam tulisan ini juga memuat tentang grafik pertumbuhan ekonomi Jepang akibat evolusi industri pariwisata domestik.²¹

Pada tulisan ini penulis dapat mengetahui faktor-faktor pendorong perkembangan industri pariwisata yaitu perilaku pemerintah, organisasi non-pemerintah, sumber daya pariwisata, dan lingkungan wisata. Perbedaan tulisan di atas dengan penelitian ini adalah pada subjek yang diteliti, pada penelitian ini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan kontrol perbatasan Jepang, sedangkan tulisan di atas membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan industri pariwisata di Jepang.

Ketiga, referensi yang penulis gunakan dalam meninjau kebijakan ekonomi dan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang pada pandemi Covid-19 yaitu sebuah tulisan karya Gainha Kim, Justine M. Natuplag, Sui Jin Lin, Jinyi Feng dan Nicolas Ray yang berjudul “*Balancing Public & Economic Health in Japan during the COVID-19 Pandemic : A Descriptive Analysis*”. Artikel ini meneliti tentang tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Tulisan ini menjabarkan keberhasilan Pemerintah Jepang dalam menekan angka kasus Covid-19 dan tetap menstabilkan ekonomi domestik. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Jepang cenderung lebih

²¹ Xiaozheng Liu, “Cause Analysis of the Development of Japan’s Tourism Industry Based on the Push-Pull Theory” 2 (January 9, 2023).

memperhatikan ekonomi dibandingkan kesehatan masyarakat walaupun angka Covid-19 dapat dikendalikan.²²

Melalui tulisan ini penulis dapat mengetahui kronologi pandemi Covid-19 di Jepang yang mana terdapat sedikit keterlambatan respon terhadap Covid-19 oleh pemerintah Jepang yaitu terdapat manipulasi data, kurangnya pencegahan masuknya Covid-19 melalui kapal *Diamond Princess*. Akibat pandemi Covid-19, olimpiade yang dijadwalkan pada 2020 di Tokyo ditunda sampai kondisi pandemi Covid-19 dapat dikendalikan. Selain itu melalui artikel ini penulis dapat mengetahui tentang kampanye ‘Go to Travel’ yang diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas wisata domestik dapat berpengaruh cukup pesat dalam merangsang ekonomi masyarakat Jepang yang bergantung kepada sektor pariwisata.

Perbedaan tulisan diatas dengan penelitian ini adalah batasan penelitian yang digunakan, tulisan diatas di publikasikan pada tahun 2022. Sedangkan tulisan ini memiliki batasan penelitian sampai Mei 2023 Kemudian kelebihan dari tulisan diatas dapat membantu penulis memahami dinamika politik dan ekonomi yang dialami Jepang ketika awal masa pandemi. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai bentuk lanjutan untuk meneliti kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang setelah terlaksananya Olimpiade Tokyo tahun 2021 dan kebijakan baru tentang pariwisata ketika Covid-19 dapat dikendalikan melalui vaksinasi massal.

²² Gainha Kim dkk. “Balancing Public & Economic Health in Japan during the COVID-19 Pandemic : A Descriptive Analysis”. Dipublikasikan pada 2022, Epidemiologia, <https://scholar.archive.org/work/i5axcls4o5ddllr7qb2i3faxuu>

Keempat, referensi yang penulis gunakan untuk memahami dampak hubungan bilateral Tiongkok dan Jepang terhadap kawasan lain, yaitu dari sebuah artikel jurnal karya David Arase yang berjudul “*The COVID-19 Pandemic Complicates Japan-China Relations: Will This Benefit ASEAN*”. Tulisan ini membahas tentang dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan *lockdown* Tiongkok yaitu menurunnya ekspor impor, kemudian hal ini dipandang sebagai kemunduran hubungan antara Jepang dan Tiongkok. Sehingga pada akhirnya prospek kebijakan Jepang setelah pandemi dapat menciptakan peluang baru untuk kerjasama ASEAN-Jepang.²³

Persamaan dari tulisan di atas dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang hubungan bilateral antara Tiongkok dan Jepang ketika munculnya wabah pandemi Covid-19 yang awal kemunculannya juga datang dari Tiongkok. Kemudian tulisan di atas juga membahas tantangan hubungan luar negeri keduanya dan dampak apa yang akan ditimbulkan oleh ketegangan politik. Namun perbedaannya terletak pada objek yang akan dikaji, penelitian ini akan berfokus pada perekonomian khususnya sektor ekonomi yang menjadi tantangan Jepang karena penyumbang terbesarnya adalah Tiongkok, sehingga yang akan diteliti adalah proses pengambilan keputusan Jepang terhadap wisatawan Tiongkok dalam pemulihan pariwisata.

Kelima, referensi yang penulis gunakan sebagai tinjauan untuk melihat studi kasus pembuatan keputusan di Jepang adalah sebuah artikel jurnal karya Ikuko Tsukuhara Williams yang berjudul “*Decision-Making Process in Japan*”

²³ David Arase, “*The COVID-19 Pandemic Complicates Japan-China Relations: Will This Benefit ASEAN*”. Yusof Ishak Institute Analyse Current Events, Issue: 2020 No. 83 Singapore 5 Agustus 2020.

yang membahas tentang bagaimana keputusan di Jepang dapat terbentuk, serta bagaimana kebijakan dapat terbentuk di tingkat internasional. Hal ini bergantung pada budaya dan corak masyarakat Jepang yang sudah ada sejak dulu.²⁴

Melalui tulisan ini, penulis dapat mengetahui bahwa konstitusi yang terdapat di Jepang saat ini dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan menempatkan Jepang sebagai negara demokrasi baru. Perbedaan tulisan di atas dengan penelitian ini adalah studi kasus yang akan diteliti, artikel di atas membahas tentang proses pengambilan keputusan di Jepang secara umum sedangkan penelitian ini akan membahas tentang kebijakan kontrol perbatasan Jepang dalam masa pemulihan pariwisata pasca terjadinya Pandemi Covid-19.

Kelima referensi yang telah penulis baca terkait dengan pemulihan pariwisata untuk meningkatkan ekonomi suatu negara telah memberikan kontribusi kepada penulis dalam meneliti permasalahan ini. Meskipun demikian, referensi-referensi diatas belum mampu menjawab pertanyaan penelitian yang akan penulis teliti, sehingga kajian ini diharapkan dapat membantu kajian hubungan internasional.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Decision Making Process of Foreign Policy* (Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri)

Politik internasional kontemporer melihat negara-negara berinteraksi satu sama lain dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keamanan masing-masing. Hubungan yang dijalin oleh negara-negara tersebut akan membutuhkan

²⁴ Ikuko Tsukuhara Williams, "Decision-Making Process in Japan," *Intereconomics* 10, no. 8 (August 1975): 247–248.

strategi untuk menyikapi interaksi tersebut sehingga terbentuklah kebijakan luar negeri. Jadi sebuah kebijakan luar negeri dibentuk dan dirancang sesuai kondisi politik dan situasi dunia internasional yang tujuannya untuk memenuhi kepentingan dan keamanan nasional.²⁵ Konsep kebijakan luar negeri ini berhubungan dengan kedaulatan suatu negara di mana pemerintah negara ditempatkan sebagai kekuasaan tertinggi dalam mengambil menyikapi dinamika politik internasional yang anarki.

Setiap konsep dan teori memiliki pondasi yang melatarbelakanginya, hal ini berarti konsep pembuatan Kebijakan Luar Negeri berlandaskan kepada teori dasar yang kemudian dimodifikasi sehingga kemudian dipakai oleh peneliti untuk memandang dan bereaksi terhadap suatu fenomena. Analisis Politik Luar Negeri meliputi proses dan resultan dari para pembuat keputusan dengan mengacu kepada konsekuensi yang diketahui oleh entitas luar negeri. Para pembuat keputusan merumuskan sebuah kebijakan selain untuk mempertimbangkan dampak ke luar, suatu keputusan dapat dipertimbangkan pada kondisi tertentu yang mana juga berdampak kepada domestik.²⁶

Ahmed Aref Al Kafarneh seorang doktor di bidang Ilmu Politik di Universitas Terapan Al Balqa di Yordania. Ahmed banyak menulis studi konflik politik di Kawasan Timur Tengah, diantaranya adalah analisis kebijakan luar negeri Amerika terhadap minoritas di wilayah Arab, intervensi militer NATO dan dampaknya terhadap wilayah Arab, Suku dalam politik Arab (model kendala

²⁵William D. Coplin, “ Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis” Terjemahan Marsedes Marbun. Bandung: Sinar Baru. 1992 hal 17-18.

²⁶ Jack S. Levy “Learning and Foreign Policy : Sweeping a conceptual minefield”, 1994, vol. 48, issue 2, 279-312, https://econpapers.repec.org/article/cupintorg/v_3a48_3ay_3a1994_3ai_3a02_3ap_3a279-312_5f02.htm

demokrasi), dan beberapa tulisan lainnya. Pemikiran-pemikiran yang melandasi penelitian Ahmed banyak terinspirasi dari ilmuwan politik dari Arab karena sama-sama meneliti tentang kawasan Timur Tengah. Pada tulisan Ahmed yang meneliti tentang *decision making* dalam kebijakan luar negeri bersumber dari pemikiran sebelumnya yaitu Kalevi Jaako Holsti yang merumuskan konsep peran nasional dalam kebijakan luar negeri yaitu yang tertulis dalam karyanya yang berjudul "*International Politics: A Framework for Analysis*". Indikator-indikator menurut Holsti untuk menganalisis suatu kebijakan antara lain adalah: Kekuatan militer, aspek ekonomi, politik, kerjasama internasional dan pengaruh internasional.²⁷ Selain itu, Kafarneh juga banyak terinspirasi dari Hani Al Hadithi, seorang professor ilmu Hubungan Internasional dari Irak yang juga membahas tentang indikator dalam pembuat keputusan luar negeri, Hadithi berpendapat bahwa kebijakan yang diambil oleh negara-negara saat ini mencerminkan kepentingan mereka, ideologi, filosofi, dan sasaran politik dari sistem politik mereka, sehingga pada akhirnya dapat diterapkan.²⁸

Kafarneh mendefinisikan proses pengambilan keputusan sebagai seperangkat aturan dan metode yang digunakan oleh para partisipan dalam struktur pengambilan keputusan untuk suatu hal tertentu atau pilihan preferensi untuk memecahkan masalah tertentu. Untuk mengambil keputusan dimulai adanya suatu masalah atau suatu insentif, membuat pengambil keputusan terhadap masalah tersebut, karena mereka melihat tersebut menimbulkan ancaman terhadap tujuan politik luar negeri negara. Ketika pengambil keputusan merasa

²⁷ Ahmed Aref Al Kafarneh, "Decision-making in foreign policy", *Journal of Law, Policy and Globalization*, International Institute for Science, Technology and Education (IISTE), ISSN 2224-3259(Online), Vol.10,2013.

²⁸ Hani Al Hadithi, <https://www.iasj.net/iasj/download/6435af65591542c3>.

ada hambatan dalam mencapai tujuan mereka, hal ini mengarahkan mereka untuk membuat keputusan-keputusan untuk meloloskan tujuan tersebut. Tidak perlu menjadikan masalah sebagai syarat untuk mengambil keputusan, mungkin saja ada keadaan positifnya pengambil keputusan kebijakan luar negeri untuk mengeksploitasi, membuat serangkaian keputusan yang akan memungkinkan mereka mempercepat pencapaian tujuan mereka, setelah adanya sikap untuk mengambil keputusan maka kemudian prosesnya melalui beberapa tahapan berikut:

- 1) Kesadaran pengambil keputusan terhadap masalah: Kesadaran para pengambil keputusan merupakan proses penyadaran melalui informasi yang diperoleh dari semua pihak yang berbeda-beda. Hal ini memaksa para pembuat keputusan melangkah kepada suatu keyakinan dan posisi tertentu.
- 2) Tahap definisi situasi: Definisi situasi yang dimaksudkan adalah mempelajari masalah dan menganalisis seluruh dimensi serta menentukannya dampaknya terhadap kepentingan negara, hal ini dilakukan dengan menafsirkan informasi yang dikandungnya dan disini juga karakteristik pribadi memainkan peranan penting, karena mereka menafsirkan informasi dengan menggambarkan posisi diri dan mengenalinya.
- 3) Proses identifikasi alternatif dan pengambilan keputusan: setelah pendefinisian situasi dimulailah tahap pemilihan terhadap alternatif-alternatif yang sesuai dengan mempertimbangkan alternatif-alternatif tersebut tersedia bagi pengambil keputusan, karena terdapat alternatif-

alternatif yang tidak diduga sebelumnya, dan hal ini disebabkan banyak hal yang mempengaruhi proses pencarian pada semua alternatif. Pembuat keputusan harus memperhatikan pihak-pihak lain yang terkena dampak dari keputusan tersebut, seperti kemungkinan berhasil dan gagalnya dilihat dari kemampuan pelaksanaannya atau tidak, dan di sini sulit untuk melakukannya yang mana berhubungan dengan menentukan konsekuensi kognitif, yang tidak hanya terjadi setelah pelaksanaan keputusan tersebut.

- 4) Umpan balik: fase ini merupakan aliran balik informasi kepada badan pengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri, reaksinya bisa saja positif ataupun negatif. Hal ini disebabkan oleh tingkat keberhasilan mencapai tujuan negara.²⁹

Ahmed Aref Al Kafarneh menjelaskan lebih rinci soal proses pembuatan Keputusan Luar Negeri pada tahun 2013. Kafarneh tetap memakai konteks internasional dan domestik sebagai faktor utama negara dalam merumuskan kebijakan mereka. Berikut beberapa elemen yang terdapat dalam proses pembuatan keputusan menurut Kafarneh:

²⁹ Ahmed Aref Al Kafarneh, "Decision-making in foreign policy", *Journal of Law, Policy and Globalization*, International Institute for Science, Technology and Education (IISTE), ISSN 2224-3259(Online), Vol.10,2013.

1. Konteks Domestik

Terdapat beberapa unsur internal yang turut andil dalam pembuatan keputusan luar negeri:

a. Sistem Ekonomi dan Politik

Proses pengambilan keputusan luar negeri berkaitan erat dengan sistem ekonomi dan politik di suatu negara yaitu apakah negara tersebut menganut sistem demokratis atau non demokratis kemudian berapa badan yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam negara demokratis melalui proses diskusi dan konsultasi dengan banyak pihak dan harus dilaksanakan dengan satu tujuan yang sama. Pada negara non demokratis proses pengambilan keputusan berlangsung dengan cepat dan aktor yang terlibat di dalamnya juga terbatas. Sehingga apabila dihadapkan dengan situasi eksternal, negara akan langsung mengeluarkan kebijakan tanpa harus meminta persetujuan dari institusi lain seperti dalam sistem demokratis.³⁰

Proses pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi. Negara yang memiliki ekonomi yang kuat serta memiliki kekayaan alam dan kapasitas produksi yang relatif besar memiliki lebih banyak kebebasan ketika memilih alternatif yang diusulkan, karena ekonomi membantu mereka untuk mencapai tujuan yang mereka cari melalui kebijakan. Namun sumber daya ekonomi negara ini terkadang tidak cukup untuk mencapai keberhasilan kebijakan luar negerinya,

³⁰ Ahmed Aref Al Kafarneh, "Decision-making in foreign policy", *Journal of Law, Policy and Globalization*, International Institute for Science, Technology and Education (IISTE), ISSN 2224-3259(Online), Vol.10,2013.

sehingga negara harus mempertimbangkan secara matang keputusan yang akan dibuat. Kemudian, Kafarneh juga mempercayai bahwa dalam membuat kebijakan harus dihubungkan dengan situasi ekonomi dan politik sehingga akan tercapai keuntungan dari kedua unsur tersebut.

b. Partai Politik

Partai politik berkontribusi dalam merumuskan kebijakan luar negeri, yaitu ketika sistem politik suatu negara bergantung pada kebijakan satu partai. Partai politik yang berkuasa akan menggunakan prinsip dan tujuan mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Negara-negara sosialis dan beberapa negara berkembang yang memiliki satu partai yang berkuasa memiliki peran yang kuat dan mutlak, sedangkan negara yang memiliki sistem multi partai akan memiliki pengaruh yang berbeda tergantung pada konteks kebijakannya.³¹

c. *Lobbyists* (Pelobi)

Para pelobi adalah sekumpulan orang dari beberapa organisasi dengan kepentingan yang sama dan dengan jenis yang berbeda-beda. Berbeda dengan partai politik, para pelobi ini tidak memiliki akses ke kekuasaan. Mereka menekan para pembuat keputusan yang memiliki kekuasaan untuk mencapai tujuannya. Kelompok kepentingan ini contohnya adalah perusahaan besar yang mempunyai hubungan dengan negara lain, baik itu perusahaan cabang ataupun mitra dagang.

Sehingga mereka berusaha agar kebijakan luar negeri yang dibuat

³¹ Ahmed Aref Al Kafarneh, "Decision-making in foreign policy", Journal of Law, Policy and Globalization, International Institute for Science, Technology and Education (IISTE), ISSN 2224-3259(Online), Vol.10,2013.

tidak akan berdampak negative bagi perusahaan di masa depan. Selain menekan para pembuat keputusan, para pelobi juga membawa opini publik sebagai landasan pertimbangan negara dalam membuat keputusan.

d. *Public Opinion* (Opini Masyarakat)

Opini publik didefinisikan sebagai ekspresi dari sejumlah besar orang dalam posisi tertentu, hal ini bertujuan untuk mendukung atau menolak suatu isu yang nantinya jumlah opini ini akan mempengaruhi pihak yang ditujukan. Sehingga, opini publik merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembuatan keputusan. Keprihatinan masyarakat terhadap suatu isu memaksa para pembuat keputusan harus bertindak secara adil.

Teknologi yang terus berkembang mendorong masyarakat mengungkapkan pendapat mereka melalui jejaring sosial. Tak jarang pula mereka menyampaikan kritik mereka terhadap pemerintah. Sehingga pada akhirnya pemerintah akan terdesak dalam proses pengambilan keputusan.³²

2. Konteks Internasional

A. Sistem Publik Internasional

Kebijakan dari negara-negara besar biasanya mempertimbangkan kekuatan dinamis dan interaktif yang mengatur proses kehidupan dalam negeri dan di dunia internasional. Sehingga penting untuk

³² Ahmed Aref Al Kafarneh, "Decision-making in foreign policy", Journal of Law, Policy and Globalization, International Institute for Science, Technology and Education (IISTE), ISSN 2224-3259(Online), Vol.10,2013.

membuat pertimbangan secara serius sebelum meluncurkan kebijakan ke luar negeri. Hal yang tak kalah pentingnya adalah melihat perubahan bentuk dan sifat sistem publik internasional, karena terdapat beberapa rezim yang diikuti oleh negara-negara sehingga pada akhirnya negara yang menyetujui banyak rezim tidak bisa bergerak dengan bebas dalam merumuskan kebijakan mereka.

Struktur internasional seperti inilah yang ikut mengambil peran penting dalam proses pembuatan keputusan. Berikut beberapa unsur sistem internasional di era kontemporer:

- a) Organisasi internasional terpenting seperti PBB, organisasi penegakan HAM dan organisasi masyarakat sipil.
- b) Hubungan negara hukum menurut hukum internasional, yaitu dinilai dari hubungan antar negara yang positif atau negatif.
- c) Pembentukan kelompok ekonomi dan militer dalam proses pembuatan keputusan negara anggota. Dalam hal ini negara anggota perlu merumuskan keputusan mereka sejalan dengan tujuan blok, metode serta idenya. Pembatasan perdagangan yang dilakukan oleh suatu pakta menunjukkan seberapa rapuhnya sistem bipolar, sedangkan negara yang tidak memiliki blok akan tidak terikat oleh pilihan blok dan dapat bergerak lebih leluasa.³³

B. Krisis Politik Internasional

Krisis politik internasional diartikan sebagai suatu sikap politik yang tiba-tiba menjadi ancaman politik terhadap tujuan negara. Krisis

³³ Ahmed Aref Al Kafarneh, "Decision-making in foreign policy", Journal of Law, Policy and Globalization, International Institute for Science, Technology and Education (IISTE), ISSN 2224-3259(Online), Vol.10,2013.

politik internasional ditandai dengan kejutan, ancaman dan waktu yang singkat, hal ini berarti bahwa dalam membuat keputusan harus dalam waktu yang benar-benar singkat. Sehingga, akan terjadi pengurangan anggota dalam proses pembuatan keputusan luar negeri. Namun, terkadang krisis dapat berdampak negatif bagi kemampuan kognitif para pembuat keputusan sehingga menimbulkan stress dan rasa cemas yang berujung pada kurangnya kemampuan para pembuat keputusan dalam mengidentifikasi informasi terhadap isu terkait dan mencari alternatif penyelesaian pembuatan keputusan dalam waktu yang instan inilah yang menjadi penentu keberhasilan seorang pemimpin negara apakah dia berhasil menjadikan sebuah tekanan menjadi suatu peluang yang menguntungkan ataupun mendatangkan krisis baru.³⁴

Pemikiran ini cocok dipakai dalam meneliti apa yang menjadi faktor pembuatan keputusan Jepang dalam menerapkan kebijakan kontrol perbatasan terhadap wisatawan dari Tiongkok disaat mereka ingin memulihkan sektor pariwisata setelah mengalami penurunan pendapatan karena pandemi. Jepang sebagai pembuat keputusan ini memenuhi elemen-elemen proses pembuatan kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh Kafarneh, karena dengan melihat proses pembuatan keputusan luar negeri kita dapat menemukan alasan rasional dari Jepang dalam menerapkan kebijakan tersebut.

³⁴ Ahmed Aref Al Kafarneh, "Decision-making in foreign policy", Journal of Law, Policy and Globalization, International Institute for Science, Technology and Education (IISTE), ISSN 2224-3259(Online), Vol.10,2013.

1.8 Metode Penelitian

Metodologi merupakan tahap-tahap yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru dengan memaparkan teori dalam rangka menentukan metode yang tepat untuk menjelaskan dan menelaah fenomena hubungan internasional.³⁵ Sedangkan metode penelitian adalah alat dan cara penelitian yang diterapkan dalam proses penelitian.³⁶ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Shank mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu bentuk penyelidikan empiris yang sistematis. Maksud dari sistematis itu sendiri adalah metode yang direncanakan, diatur dan umum. Empiris maksudnya adalah bahwa jenis penelitian ini didasarkan pada dunia pengalaman, peneliti mencoba untuk memahami bagaimana orang lain memahami pengalaman mereka. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif melibatkan pendekatan interpretatif dan naturalistik, ini berarti bahwa penelitian kualitatif mempelajari hal-hal dalam pengaturan alami mereka, mencoba untuk memahami atau untuk menafsirkan fenomena dalam hal makna yang orang bawa ke mereka.³⁷

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian dengan mengumpulkan dari berbagai sumber ilmiah dan berbagai subjek penelitian yang menggunakan metode analisis deskriptif. Maka dari itu nantinya penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian ini yang berupa fakta dan data yang telah didapatkan secara lebih detail dan

³⁵Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) hal.14-19.

³⁶Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, hal.14-19.

³⁷ Sonia Ospina, "Qualitative Research", Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, New York University, SAGE Publication, 2004.

terperinci dan kemudian mengolahnya hingga menemukan alasan dibalik suatu peristiwa. Penelitian dengan metode kualitatif tidak terdapat bilangan-bilangan yang harus diolah terlebih dahulu, namun hanya harus menganalisis data-data yang sudah ada untuk kemudian di elaborasi kembali.³⁸ Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian analisis deskriptif karena akan membahas apa saja faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Jepang dalam memberlakukan kontrol perbatasan terhadap wisatawan Tiongkok ketika dalam waktu yang sama mereka ingin melakukan pemulihan pariwisata pasca Covid-19 melalui sumber terpercaya. Jenis penelitian dipilih agar penulis dapat lebih leluasa menjelaskan tentang kebijakan kontrol perbatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang terhadap wisatawan Tiongkok dalam pemulihan pariwisata pasca Covid-19.

1.8.2 Batasan Penelitian

Adanya batasan penelitian membantu mengarahkan penelitian ini, sehingga memungkinkan isu utama yang akan diteliti dapat dijelaskan lebih jelas dan detail. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan menetapkan batasan dari tahun 2019 - Mei 2023. Periode ini dipilih karena pada tahun 2019 merupakan rekor tertinggi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jepang dan pada tahun tersebut juga mulai terdeteksi adanya Virus Corona di Tiongkok. Pada tahun 2020 hingga 2021 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian Jepang terutama industri pariwisata. Pada tahun 2023 Pemerintah Jepang meluncurkan kebijakan untuk membuka lagi pintu perbatasannya dan

³⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). 2018

mempromosikan pariwisatanya kepada dunia internasional, namun Jepang mengecualikan Tiongkok sebagai negara yang masih dipersulit untuk masuk.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis adalah suatu objek yang perilakunya dideskripsikan dan diprediksi biasa disebut variabel dependen, di sisi lain objek yang mempengaruhi variabel dependen adalah variabel independen atau disebut unit eksplanasi.³⁹ Unit analisis pada penelitian ini adalah kebijakan kontrol perbatasan Jepang terhadap wisatawan Tiongkok. Unit eksplanasi dari penelitian ini adalah pemulihan pariwisata Jepang setelah pandemi Covid-19. Tingkat analisis penelitian ini adalah negara karena upaya dan usaha dilakukan pada tingkat negara. Kemudian karena kebijakan yang diterapkan oleh Jepang ini memicu reaksi keras dari Tiongkok sehingga hal ini menunjukkan kegagalan Institusi domestik dalam membuat keputusan yang bijak.⁴⁰

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan dan bahan bacaan seperti buku, artikel jurnal, dokumen, laporan, arsip atau literatur yang membahas tentang permasalahan terkait.⁴¹ Pengumpulan data dibagi atas dua macam yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data asli yang bersifat mentah sehingga perlu diolah untuk dimasukkan ke dalam penelitian, contohnya seperti wawancara, kuisisioner atau sampel jaringan. Kemudian data sekunder adalah data yang bersumber dari data primer

³⁹ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* (Jakarta 1990)

⁴⁰ Amrita Chaudary, "Level Analysis in International Relations ", *International Journal of Science and Research (IJSR)* Volume 11 Issue 12, Desember 2022.

⁴¹ M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta,2003) Hal.27.

yang sudah diolah dan diorganisir, contohnya seperti transkrip wawancara, file data SPSS atau analisa produk.⁴² Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengakses akun *Twitter* Kementerian Luar Negeri Jepang yaitu @MofaJapan_en berisi tentang data kebijakan Pemerintah Jepang dan informasi terkait tentang pariwisata Jepang. Serta data sekunder bersumber dari artikel ilmiah, situs berita, dan buku untuk kemudian di analisis. Kemudian mengakses situs resmi Kementerian Pariwisata Jepang (www.mlit.go.jp) yang berisi tentang kebijakan-kebijakan pariwisata yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang secara resmi baik itu di lingkup domestik maupun internasional.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan teknik untuk memproses pengambilan data yang diperoleh secara langsung di lapangan maupun melalui perantara tertentu, kemudian langkah selanjutnya adalah mereduksi data yaitu dengan menajamkan, mengelompokkan dan menyeleksi data-data yang diperlukan.⁴³ Penelitian ini akan menganalisis isu yang diangkat dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diolah menggunakan data kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan dan menyeleksi informasi dari sumber yang terkait dengan kebijakan Jepang yang berhubungan dengan isu pariwisata di Jepang pada masa pandemi Covid-19 hingga setelahnya melalui situs resmi pemerintah Jepang dan menganalisis permasalahan tersebut dengan reaksi dan dampak yang ditimbulkan dari

⁴² Deakin University “Primary Versus Secondary Data”, diakses pada 5 Juli 2023, <https://www.deakin.edu.au/library/research/manage-data/plan/primary-versus-secondary-data?&&&&#>

⁴³ Miles, M.B., & Huberman, A.M.(1994), *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed). Sage Publication, Inc.

kebijakan-kebijakan tersebut. Kemudian data tersebut akan dijelaskan menggunakan variabel dependen dan independen pada penelitian sehingga dapat dikategorikan ke dalam pola-pola yang penulis miliki. Setelah itu, melakukan analisis data sesuai dengan konsep proses pembuatan keputusan luar negeri oleh Ahmed Aref Al Kafarneh, sesuai dengan beberapa determinan yang diusulkan oleh pakar tersebut.

1.9 Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Bagian ini membahas mengenai latar belakang dari penelitian, menemukan rumusan masalah, menentukan pertanyaan penelitian, menjabarkan kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, metodologi penelitian yang digunakan, yaitu meliputi jenis penelitian, batas masalah, tingkat dan unit analisis, teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan data dan analisis data serta sistematika penulisan.

Bab II Munculnya Pandemi COVID-19 dan Dampaknya terhadap Jepang dan Tiongkok

Bagian ini akan membahas tentang Covid-19 yang muncul di Tiongkok dan dampaknya terhadap politik luar negeri Jepang. Dan dampak terhadap pariwisata di Jepang dan juga menyajikan data-data mengenai prestasi dan kebijakan yang diterapkan oleh Jepang terhadap sektor pariwisata.

Bab III Kebijakan dalam Pandemi di Jepang

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang kebijakan kontrol perbatasan yang diterapkan Jepang mulai dari awal pandemi Covid-19 hingga masa pasca pandemi.

Bab IV Faktor-Faktor dalam Pembuatan Keputusan Kontrol Perbatasan Jepang terhadap Wisatawan Tiongkok dalam Memulihkan Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kebijakan kontrol perbatasan yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang terhadap wisatawan Tiongkok dalam pemulihan pariwisata pasca Covid-19 dengan menggunakan kerangka konsep yang telah dipilih sebelumnya dan menjabarkan elemen-elemen apa saja yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.

Bab V Penutup

Bab ini akan mencantumkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

